



LAPORAN KINERJA 2025

DEPUTI BIDANG STATISTIK
DISTRIBUSI DAN JASA



LAPORAN KINERJA 2025

DEPUTI BIDANG STATISTIK
DISTRIBUSI DAN JASA

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah Nya sehingga Laporan Kinerja Tahun 2025 terselesaikan dengan capaian kinerja yang baik. Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa mampu melewati tahun 2025 yang merupakan awal penyusunan rencana kerja yang bertujuan merumuskan arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan kinerja yang baik. Di dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan awal tahun, capaian kinerja menurut indikator kinerja utama, sumber daya manusia dan informasi lainnya yang berkaitan dengan kinerja Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa pada tahun 2025.

Pencapaian kinerja Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa adalah hasil kerja keras seluruh jajaran Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dan BPS daerah serta dukungan dari para pemangku kepentingan, baik institusi pemerintah maupun swasta. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu pelaksanaan program kerja tahun 2025. Semoga hasil capaian kinerja ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi perencanaan program dan anggaran, serta perumusan kebijakan bidang statistik di tahun mendatang.

Jakarta, 19 Januari 2026

Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa



Pudji Ismartini





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN EKSEKUTIF	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi.....	3
1.3. Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran.....	4
1.4. Potensi dan Permasalahan	7
1.5. Sistematika Penyajian Laporan	10
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	14
2.1. Visi dan Misi BPS.....	14
2.2. Target Kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa 2025-2029.....	18
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	20
2.4. Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025	21
2.5. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025	25
BAB 3 Akuntabilitas Kinerja.....	29
3.1 Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025	28
3.2 Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Terhadap Target Renstra 2025-2029.....	40
3.3 Capaian Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025	42
3.4 Prestasi dan Inovasi Unit Kerja	45
3.5 Realisasi dan Efisiensi Anggaran.....	49
BAB 4 PENUTUP.....	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	56
LAMPIRAN.....	58





DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah SDM Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2025.....	7
Tabel 2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa 2025-2029	20
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa	20
Tabel 4. Program Anggaran Awal Tahun 2025 Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa	21
Tabel 5. Pagu Anggaran Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025.....	26
Tabel 6. Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025.....	29
Tabel 7. Capaian Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) 2025	31
Tabel 8. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja per Sasaran Tahun 2023-2025.....	34
Tabel 9. Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025.....	36
Tabel 10. Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025.....	38
Tabel 11. Sasaran Program, Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja 2025 dan 2029.....	40
Tabel 12. Output yang dihasilkan.....	42
Tabel 13. Kendala, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut per Prioritas	43
Tabel 14. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025	49
Tabel 15. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Menurut Kegiatan Tahun 2025.....	51
Tabel 16. Realisasi Anggaran dan Efisiensi menurut Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	52





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025	4
Gambar 2. Persentase Pegawai Menurut Jenis Kelamin 2025	5
Gambar 3. Sumber Daya Manusia Menurut Unit Kerja dan Jenis Kelamin 2025	5
Gambar 4. Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025	6
Gambar 5. Perkembangan Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2023– 2025	29
Gambar 6. Predikat PKO Berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi	30
Gambar 7. Interpretasi PKO	30
Gambar 8. Perbandingan Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dengan Rata- rata Eselon I Badan Pusat Statistik Tahun 2025	32
Gambar 9. Tingkat Penyerapan Anggaran Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2017- 2025	51





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025 .	58
Lampiran 2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025.....	60
Lampiran 3. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025.....	61
Lampiran 4. Jumlah Pegawai Fungsional Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025.....	62
Lampiran 5. Daftar Dokumen Pemerintah Yang Digunakan Sebagai Dasar Hitung Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS) Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025	63
Lampiran 6. Daftar K/L/Pemda Target Pembinaan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa tahun 2025.....	65
Lampiran 7. Daftar Prestasi/Penghargaan Deputi bidang statistik distribusi dan jasa tahun 2025.....	66
Lampiran 8. Daftar Inovasi Unit Kerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025	67
Lampiran 9. Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025.....	68





RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025 merupakan gambaran kinerja dari seluruh unit kerja di Lingkungan Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, termasuk pengukuran dan evaluasi terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama tahun 2025. Laporan ini disusun dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja kepada publik.

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Badan Pusat Statistik selama lima tahun yang kemudian dirinci dalam Rencana Strategis Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa. Tahun 2025 merupakan awal pelaksanaan Rencana Strategis Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa tahun 2025-2029.

Laporan kinerja tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa tahun 2025. Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa memiliki dua Sasaran Strategis yang diukur dengan dua Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Peningkatan pemanfaatan data dan insight statistik Distribusi dan Jasa yang berkualitas serta Terwujudnya penyelenggaraan Statistik Sektorial Kementerian/Lembaga Mitra Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98,40 persen.



Dari segi anggaran, pencapaian kinerja sasaran Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa menggunakan sumber daya anggaran sebesar 38,22 miliar rupiah atau 84,44 persen dari alokasi anggaran sebesar 45,27 miliar rupiah. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 1,17 persen. Hal ini dilakukan dengan upaya optimalisasi penyerapan anggaran dengan disertai penggunaan secara efektif dan akuntabel, namun tetap menjaga kualitas output Statistik Distribusi dan Jasa yang dihasilkan.



Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi dalam mencapai tujuan organisasi. Laporan ini juga diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa sehingga berdampak positif dalam mendukung terwujudnya Indonesia emas yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.



BAB 1

PENDAHULUAN

1. Latar belakang
2. Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Unit Kerja
3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran
4. Potensi dan Permasalahan
5. Sistematika Penyajian Laporan

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pentingnya pembangunan birokrasi pemerintahan yang berlandaskan *good governance* di era keterbukaan saat ini merupakan sebuah keharusan. Pemerintah dituntut untuk mampu memberikan respon terhadap tantangan dari luar, lebih cermat dalam menyikapi permasalahan bangsa yang semakin kompleks, serta lebih cekatan dalam melayani kebutuhan masyarakat tanpa adanya keberpihakan. Dalam hal ini, pemerintah harus berpijak pada pilar-pilar *good governance* yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang mendorong pemerintah menjadi lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa sebagai bagian dari instansi pemerintah Badan Pusat Statistik melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk menilai capaian kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja Tahunan yang harus disampaikan selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan laporan kinerja ini dilaksanakan guna menjelaskan hasil kinerja organisasi selama kurun waktu tahun 2025 sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden di atas. Laporan kinerja ini tidak hanya berisi informasi tentang keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan kepada suatu instansi pemerintah tetapi juga gambaran tentang penerapan manajemen kinerja di instansi tersebut. Selain itu, melalui laporan kinerja ini juga dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan dan sejauh mana kemajuan setiap program yang dijalankan mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan selama periode perencanaan.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025 yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah untuk menilai dan



mengevaluasi pencapaian kinerja selama tahun 2025 sesuai dengan misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam perumusan perencanaan di masa yang akan datang.

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa merupakan salah satu unit Eselon I di Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa mempunyai tugas sebagai berikut.

Melaksanakan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Statistik Distribusi dan Jasa

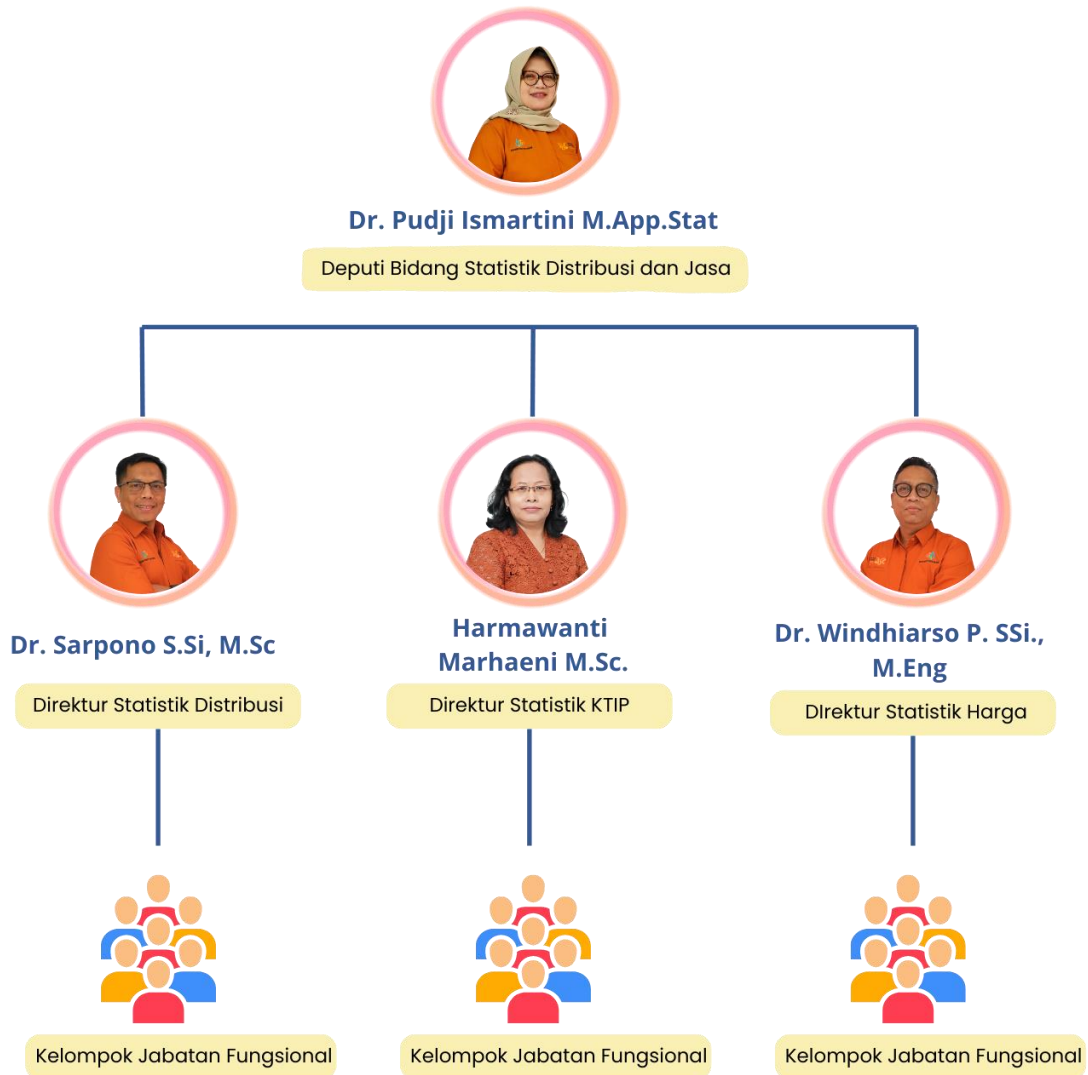
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- > Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pemberian bimbingan, dan pembinaan di bidang statistik perdagangan, harga, keuangan dan jasa.
- > Pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang statistik perdagangan, harga, keuangan, dan jasa.
- > Pelaksanaan pengembangan statistik perdagangan, harga, keuangan, dan jasa.
- > Pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BPS.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dibantu oleh 3 (tiga) unit Eselon II yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa. Ketiga unit kerja tersebut yaitu:

01. Direktorat Statistik Distribusi
02. Direktorat Statistik Harga
03. Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata

Secara rinci, bagan struktur organisasi Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025

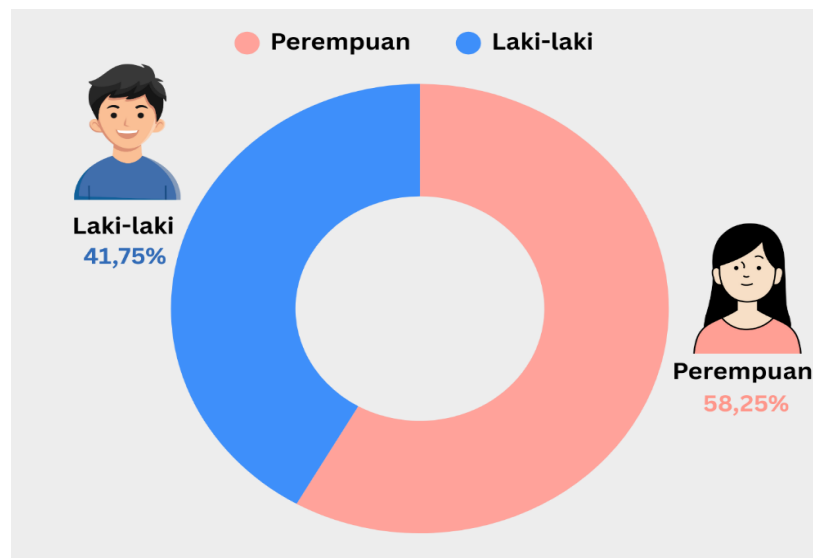
1.3. Sumber Daya Manusia dan Dukungan Anggaran

Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur merupakan aset penting bagi organisasi untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi. SDM aparatur merupakan *human capital* bagi organisasi dalam menggerakkan dan menentukan keberhasilan organisasi untuk mencapai target atau sasarannya. Selain itu, sejalan dengan dinamika perkembangan global di Era Revolusi Industri 4.0, serta dalam rangka mengimplementasikan Reformasi Birokrasi, maka diperlukan SDM yang kompeten dan unggul.

Dalam mengemban tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa didukung oleh 194 orang pegawai (data per 31 Desember 2025) yang terdiri dari 81 orang pegawai laki-

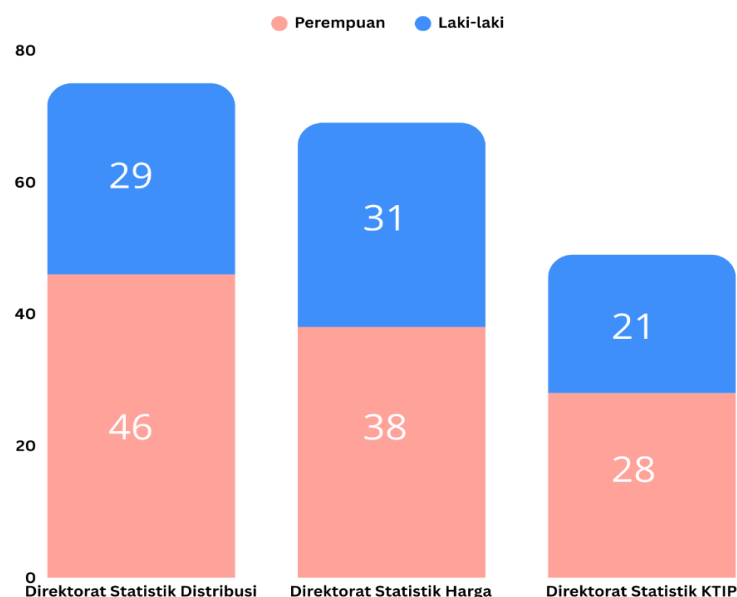


laki dan 113 orang pegawai perempuan (Gambar 2). Pegawai tersebut tersebar pada tiga unit Eselon II.



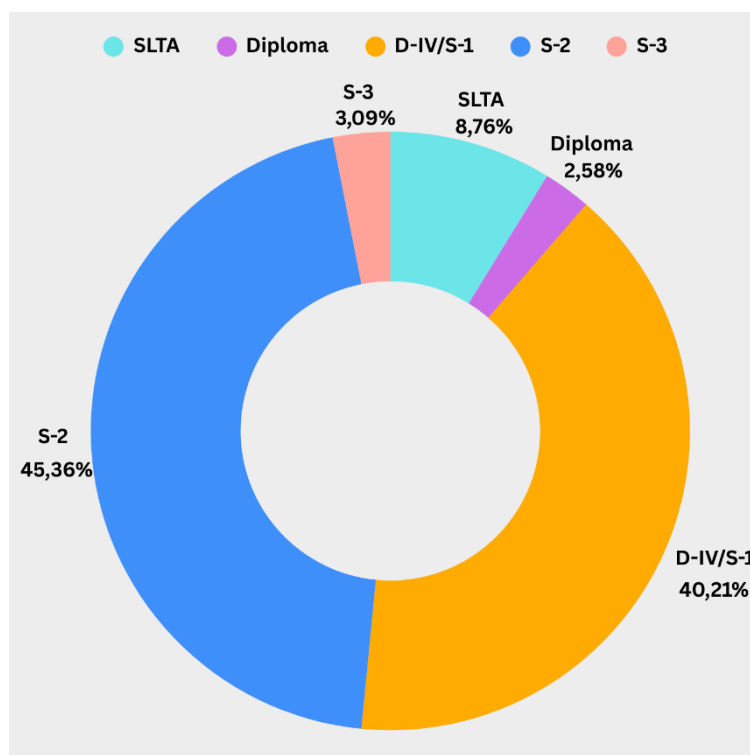
Gambar 2. Persentase Pegawai Menurut Jenis Kelamin 2025

Sebaran pegawai pada Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, yang dipimpin oleh Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat. sebagai Deputy, pada masing-masing unit kerja yaitu: Direktorat Statistik Distribusi sebanyak 75 orang pegawai, Direktorat Statistik Harga sebanyak 69 orang pegawai, dan Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata sebanyak 49 orang pegawai.



Gambar 3. Sumber Daya Manusia Menurut Unit Kerja dan Jenis Kelamin 2025

Kualitas SDM secara tidak langsung dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Pada Tahun 2025, SDM di lingkungan Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa memiliki kualitas yang baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa. Hal tersebut terlihat dari proporsi pegawai dengan tingkat pendidikan minimal setingkat sarjana (D-IV/S-1) sebesar 88,66 persen (Gambar 4). Upaya pengembangan kompetensi baik *hard skill* maupun *soft skill* SDM senantiasa terus dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk menempuh pendidikan lanjutan, *coaching*, *mentoring*, *training*, seminar, *workshop*, kursus, dan lainnya.



Gambar 4. Sumber Daya Manusia Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa setiap pegawai pemerintah dituntut untuk memiliki keahlian khusus yang disebut dengan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT). Pegawai Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa yang menduduki JFT sampai tahun 2025 berjumlah 181 pegawai atau sekitar 93,30% persen dari total pegawai, dengan komposisi per unit Eselon II diperlihatkan pada Tabel 1. Secara rinci, jumlah pegawai Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa menurut tingkat pendidikan Tahun 2025 dapat dilihat pada Lampiran 1.

Tabel 1. Jumlah SDM Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Direktur	JFU*	Jabatan Fungsional Tertentu					Persentase Jabatan Fungsional
					Statistisi Terampil	Statistisi Ahli	Prakom Ahli	Arsiparis	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa	1								
2	Direktorat Statistik Distribusi	75	1	2	9	61	1	1	72	96,00
3	Direktorat Statistik Harga	69	1	2	5	60	-	1	66	95,65
4	Direktorat Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata	49	1	5	3	39	-	1	43	87,76
TOTAL		194	3	9	17	160	1	3	181	93,30

*JFU: Jabatan Fungsional Umum/Non-Fungsional

Dalam upaya menuntaskan rencana kinerja yang telah disepakati di awal tahun anggaran, tersedianya sumber daya manusia yang mumpuni juga perlu diimbangi dengan dukungan dari sumber daya anggaran agar setiap kegiatan dapat dituntaskan secara optimal. Di tahun anggaran 2025, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa memperoleh dukungan anggaran penyediaan dan pengembangan statistik sebesar 45,3 miliar rupiah (sesudah *self-blocking*) dan 255,7 miliar rupiah (sebelum *self-blocking*). Alokasi tersebut telah dimanfaatkan untuk mendukung kinerja dengan realisasi mencapai sebesar 38,2 miliar rupiah atau 84,44 persen (sesudah *self-blocking*).

1.4. Potensi dan Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa sebagai satuan kerja BPS telah memiliki perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independensi BPS sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Undang-undang ini merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Hal ini menjadi kekuatan bagi BPS, khususnya juga Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, untuk mengembangkan kegiatan perstatistikan kedepannya.

Data statistik sangat penting dalam bidang perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional serta perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy making*). Perkembangan kemajuan teknologi dan informasi telah memengaruhi perubahan perilaku masyarakat modern yang membutuhkan data secara *realtime* dan lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), lebih berkualitas (*better*), serta lebih murah (*cheaper*). Hal tersebut menjadi fokus utama BPS untuk menyediakan data secara lebih cepat, akurat, dan dapat diakses publik dengan mudah melalui *website* BPS. Begitu pula dengan data statistik distribusi dan jasa yang juga sangat penting bagi kalangan internal BPS maupun kalangan eksternal, baik sebagai dasar perencanaan, monitoring, evaluasi, maupun sebagai acuan penentuan kebijakan. Beberapa hal yang dapat dipetakan sebagai potensi dan permasalahan di Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dijelaskan sebagai berikut.

- a) Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Distribusi dan Jasa tahun 2025 sebesar 91,96 persen meliputi Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Dokumen Pemerintah (TPDS-dp) Tahun 2025 sebesar 95,83 persen dan Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Menurut Persepsi Pengguna (TPDS_u) sebesar 76.47 persen.
- b) Pesatnya eskalasi teknologi ilmu pengetahuan dalam lima tahun terakhir memberikan arti pentingnya *big data* dalam peningkatan kualitas statistik yang dihasilkan oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa. Pemanfaatan sumber data baru mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendataan. Salah satu pemanfaatan *big data* yang telah dilakukan yakni pemanfaatan *Mobile Positioning Data* (MPD) dalam penyusunan indikator statistik pariwisata.
- c) Perkembangan sektor jasa di Indonesia yang semakin pesat juga memberikan peluang yang besar bagi Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa untuk mengembangkan kegiatan dan program kerja di bidang statistik untuk menghasilkan statistik sektor jasa yang andal dan akurat.
- d) Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa telah menggunakan teknologi dan informasi yang *up to date* dalam mendukung pelaksanaan survei di Lingkungan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, antara lain berupa penerapan *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI), *Computer Aided Web Interviewing* (CAWI), dan survei *online*. Pengembangan metode statistik diharapkan dapat meningkatkan kualitas data yang dihasilkan.
- e) Selain menuntaskan rencana kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa juga terlibat dalam mendukung program-program prioritas nasional melalui penyediaan data strategis maupun melalui pembinaan statistik.



- f) Pemahaman pada statistik apa yang dibutuhkan di internal BPS, maupun data/indikator apa yang sebaiknya diproduksi belum optimal.

Beberapa permasalahan yang muncul di Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, antara lain:

- a) Masih ada beberapa pengguna data yang menggunakan data bidang statistik distribusi dan jasa selain sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Diperkirakan pengguna data untuk kepentingan bisnis, penelitian, dan Pendidikan.
- b) Persentase *response rate* atau pemasukan dokumen beberapa survei masih menjadi tantangan yang harus diatasi, khususnya pada survei dengan pendekatan usaha.
- c) *Respondent burden* (keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS) merupakan tantangan bagi Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa.
- d) Pembinaan harus dilakukan pada data yang dibutuhkan untuk memperkuat data BPS, dengan cara menggali terus kebutuhan data sektoral yang dibutuhkan.
- e) Permintaan data dan informasi yang dibutuhkan oleh konsumen dari berbagai kalangan semakin cepat (mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran) serta semakin spesifik dan luas cakupannya, terutama pada beberapa data yang bersifat strategis.
- f) Keterbatasan sumber daya manusia untuk menangani pekerjaan teknis yang mendukung pelaksanaan lapangan, baik kualitas maupun kuantitas.
- g) Aktivitas pembinaan statistik yang dilakukan untuk K/L/D/I masih mengalami permasalahan terutama kesulitan dalam menyamakan jadwal pembinaan dan kurang responsifnya K/L/D/I ketika akan dilakukan pembinaan sehingga berpengaruh terhadap nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang dihasilkan.
- h) Petugas kurang dapat menjelaskan maksud dan manfaat pendataan bagi ketersediaan informasi statistik.
- i) Keterbatasan anggaran pada saat kegiatan akan dilaksanakan.
- j) Keterbatasan penggunaan *Big Data* pada proses pengolahan maupun penyiapan bahan rilis.
- k) Keterbatasan data sektor jasa.
- l) Terbatasnya ketersediaan data sekunder sebagai sumber data kegiatan distribusi dan jasa.
- m) Terdapat indikator yang belum memenuhi standar konsep dan cakupan internasional.
- n) Pemenuhan target pendataan secara tepat waktu dengan kualitas data yang baik.
- o) Penentuan *prelist* pendataan yang akurat dan tepat sasaran.



- p) Percepatan periode pendataan dan rilis data untuk meningkatkan kualitas data khususnya pada dimensi *timeliness*.
- q) Koordinasi dan komunikasi yang lebih baik antar unit kerja BPS untuk meningkatkan akurasi perencanaan dan kualitas hasil pendataan.
- r) Koordinasi yang baik dengan produsen data administrasi, khususnya untuk kegiatan kompilasi data administrasi, agar kebutuhan data dapat terpenuhi tepat waktu dan berkelanjutan. Salah satu hal yang menjadi perhatian khusus adalah ketersediaan payung hukum interoperabilitas data dengan pihak eksternal yang masih perlu diupayakan.
- s) Koordinasi dan komunikasi dengan pihak eksternal (kementerian/lembaga) sumber data untuk meningkatkan validitas data.
- t) Penyesuaian kegiatan secara lebih lincah dan adaptif akibat isu-isu tidak terduga di tengah tahun berjalan, seperti adanya *automatic adjustment* dan gangguan infrastruktur statistik.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, sumber daya manusia (SDM) dan dukungan anggaran, potensi dan permasalahan, serta sistematika penyajian laporan.

BAB II Perencanaan Kinerja, bab ini berisi visi dan misi BPS, target kinerja Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa 2025-2029, perjanjian kinerja Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025, dukungan BPS terhadap prioritas nasional, prioritas presiden, dan isu strategis nasional Tahun 2025 serta rencana kerja dan anggaran Tahun 2025.

BAB III Akuntabilitas Kinerja, bab ini berisi realisasi, capaian kinerja, dan nilai penilaian kinerja Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025, capaian kinerja BPS terhadap target renstra, capaian prioritas nasional dan prioritas presiden, dan isu



strategis nasional Tahun 2025, prestasi dan inovasi Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, realisasi dan efisiensi anggaran.

BAB IV Penutup, pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta rekomendasi perbaikan kinerja di masa yang akan datang demi terwujudnya perbaikan kinerja.





BAB 2

Perencanaan Kinerja

1. Visi dan Misi BPS
2. Target Kinerja Unit Kerja 2025–2029
3. Perjanjian Kinerja Unit Kerja Tahun 2025
4. Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025
5. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi BPS

Visi BPS

Perumusan Visi dan Misi BPS 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan berbagai isu strategis kelembagaan yang diperkirakan akan memengaruhi peran dan posisi BPS dalam penyediaan statistik resmi berkualitas. Hal ini bertujuan untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Selain itu, perumusan visi dan misi BPS juga memperhatikan isu-isu strategis yang relevan dengan peran dan kontribusi BPS dalam mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang diwujudkan melalui 8 Misi Asta Cita dan 17 Program Prioritas Nasional.

Adapun Visi BPS dalam hal mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

“Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Sebagai lembaga yang independen, BPS menjunjung tinggi objektivitas dan netralitas dalam menyelenggarakan kegiatan statistik. Independensi ini juga menggambarkan kemampuan BPS dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai undang-undang secara profesional, bebas dari intervensi politik, ekonomi, maupun tekanan eksternal lainnya yang dapat memengaruhi integritas, objektivitas, dan akurasi data yang dihasilkan. Cakupan independensi ini meliputi hak otonomi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia, kebebasan dalam menentukan metodologi statistik yang merujuk pada standar internasional, serta kebebasan dalam menentukan jadwal publikasi data. Dengan independensi yang terjaga, BPS dapat membangun kepercayaan publik, memastikan transparansi, dan menyediakan data yang dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan evaluasi pembangunan yang akuntabel.



Sebagai lembaga yang terpercaya, BPS harus menjaga kepercayaan publik sebagai penyedia statistik berkualitas tinggi yang dihasilkan dari metodologi yang transparan dan sesuai standar sehingga dapat menjadi rujukan statistik di tingkat nasional maupun internasional. Kepercayaan ini dibangun melalui independensi dan integritas dalam pengumpulan dan analisis, konsistensi dalam penyediaan data, serta komitmen untuk menjaga kerahasiaan data pribadi sesuai undang-undang yang berlaku. Dengan kepercayaan yang kuat dari masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, BPS dapat berperan sebagai pilar utama dalam Sistem Statistik Nasional.

Sebagai lembaga yang berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan berbasis data, BPS menyediakan statistik berkualitas untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang efektif. Dalam hal ini, BPS tidak hanya berfungsi sebagai penyedia statistik, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menganalisis dan menyajikan wawasan yang sesuai dengan kebutuhan kebijakan. Dengan demikian, BPS dapat menjadi katalisator dalam menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran, transparan, adil, dan berkelanjutan dengan melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan yang baik di tingkat nasional maupun internasional.

Misi BPS

Untuk dapat mewujudkan Visi “Lembaga yang Independen, Terpercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, BPS merumuskan tiga misi yang saling terintegrasi sebagai panduan langkah ke depan. Misi BPS Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:



- 1. Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan *Insight* untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan;**
- 2. Memperkuat Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN); dan**
- 3. Memperkuat kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien.**

Melalui keterpaduan ketiga misi tersebut, BPS berkomitmen untuk menjembatani kebutuhan data nasional dengan perumusan kebijakan yang strategis dan berbasis data. Dengan demikian, Visi BPS sebagai lembaga independen, terpercaya, dan berperan aktif dapat terwujud secara konsisten memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Tujuan BPS

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi di atas, BPS menetapkan tiga tujuan strategis yang saling mendukung, yang dirancang untuk memastikan keberhasilan dalam setiap aspek penting dari operasionalnya, yaitu:

- **Tujuan 1:** Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan Insight yang Relevan;
- **Tujuan 2:** Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien; dan
- **Tujuan 3:** Mewujudkan Tata Kelola Badan Pusat Statistik yang Berkualitas, Akuntabel, Efektif, dan Efisien dalam Menyelenggarakan Statistik.

Dengan sinergi ketiga tujuan ini, BPS mampu memantapkan posisinya sebagai lembaga independen, tepercaya, dan berperan aktif dalam mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data sebagai perwujudan Visi Presiden.

Sasaran Strategis BPS

Sebagai tolok ukur pencapaian kinerja untuk setiap tujuan, BPS menetapkan tiga sasaran strategis beserta indikator kerjanya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan Insight dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan

Sasaran strategis pertama BPS berfokus pada peningkatan tingkat pemanfaatan data statistik yang tidak hanya berkualitas dari data statistik, tetapi juga dilengkapi dengan insight atau wawasan yang relevan untuk mendukung proses perumusan kebijakan publik dan pengambilan keputusan strategis. Sasaran ini mencerminkan upaya BPS dalam memperkuat posisinya sebagai penyedia utama informasi statistik yang dapat dipercaya dan dapat dimanfaatkan secara luas oleh seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, digunakan **Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berupa Tingkat Pemanfaatan Data Statistik**. Indikator ini merepresentasikan sejauh mana data dan informasi statistik yang diproduksi, dianalisis, serta disebarluaskan oleh BPS digunakan secara aktif oleh para pembuat kebijakan, akademisi, pelaku usaha, media massa,



dan masyarakat umum dalam merumuskan kebijakan, melakukan evaluasi program, serta mengambil keputusan strategis berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu

Sasaran strategis kedua menegaskan komitmen BPS dalam membangun dan memperkuat penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang berkualitas, terintegrasi, dan mampu menjamin konsistensi serta keselarasan data antar-sektor. SSN yang baik menjadi fondasi penting bagi kebijakan publik yang berbasis bukti. Selain itu, dengan adanya penyelenggaraan SSN yang terpadu, seluruh K/L/D/I mampu mendukung perencanaan pembangunan nasional secara komprehensif.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui **Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) berupa Indeks Pembangunan Statistik (IPS)**. IPS merupakan indikator komposit yang menilai tingkat kematangan (*maturity level*) penyelenggaraan statistik sektoral pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Indeks ini mencerminkan kemampuan kelembagaan dalam membangun ekosistem statistik sektoral yang terstandar, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang Bersih, Akuntabel, dan Profesional

Sasaran strategis ketiga merupakan manifestasi dari komitmen BPS dalam membangun kelembagaan yang menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), menjunjung tinggi integritas, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi penyediaan data statistik. Untuk menilai keberhasilan sasaran ini, BPS menggunakan **Indikator Kinerja Sasaran Strategis berupa Indeks Reformasi Birokrasi**. Indeks ini mengevaluasi tingkat keberhasilan BPS dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi yang mencakup penguatan integritas organisasi, efisiensi proses bisnis, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan kualitas layanan publik.

Sampai dengan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2025 ini, visi, misi, dan tujuan pada tingkat unit kerja di BPS belum ditetapkan secara resmi.

2.2. Target Kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa 2025-2029

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan unit organisasi yang disusun sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi dalam jangka waktu lima tahun. Renstra menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus sebagai dasar penetapan sasaran strategis, indikator kinerja, serta target kinerja yang akan dicapai.

Sehubungan dengan berakhirnya periode Renstra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2020–2024, penyusunan rancangan awal Renstra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025-2029 mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan di level organisasi dan nasional, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025-2029. Namun sampai dengan penyusunan LAKIN tahun 2025 ini, visi, misi, dan tujuan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa belum ditetapkan secara resmi.

Sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa periode 2025-2029, telah ditetapkan sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Peningkatan pemanfaatan data dan *insight* Statistik Distribusi dan Jasa yang Berkualitas

Sasaran strategis pertama berfokus pada peningkatan tingkat pemanfaatan data statistik yang dihasilkan atau dipublikasikan oleh unit kerja di Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, yang tidak hanya berkualitas dari data statistik, tetapi juga dilengkapi dengan *insight* atau wawasan yang relevan untuk mendukung proses perumusan kebijakan publik dan pengambilan keputusan strategis.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran ini, digunakan **Indikator Kinerja** berupa **Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Distribusi dan Jasa**. Indikator ini mengukur sejauh mana data statistik resmi yang dihasilkan atau dipublikasikan oleh unit kerja di Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa digunakan oleh pihak-pihak yang relevan, seperti pembuat kebijakan, dalam proses perumusan, pengambilan keputusan, atau evaluasi kebijakan nasional. Indikator ini mencerminkan efektivitas distribusi, relevansi, kualitas, dan keberhasilan lembaga dalam menjadikan data statistik resmi yang dipublikasikan BPS sebagai dasar bagi perumusan kebijakan publik.



Pemanfaatan Data Statistik Distribusi dan Jasa dapat digunakan dalam berbagai dokumen pemerintah seperti: Undang-Undang (UU), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Perpres RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Provinsi, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi. Selain itu, tingkat pemanfaatan data statistik distribusi dan jasa oleh pengguna data juga diukur melalui Survei Kepuasan Pengguna Data, yang mencakup lima aspek utama, yaitu:

1. Distribusi dan Aksesibilitas;
2. Relevansi;
3. Frekuensi Penggunaan;
4. Citra dan Kepercayaan; dan
5. Dampak terhadap kebijakan.

Sumber data dan metode pengumpulan untuk indikator ini diperoleh melalui *assesment* terhadap dokumen pemerintah dan pelaksanaan Survei Pemanfaatan Data Statistik.

Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektorial Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa yang Berkualitas

Sasaran strategis kedua menegaskan komitmen Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dalam membangun dan memperkuat penyelenggaraan Statistik Sektorial pada Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa melalui kegiatan pembinaan, koordinasi, dan peningkatan kapasitas statistik, guna mendorong tersedianya data sektorial yang berkualitas.

Pencapaian sasaran ini diukur melalui **Indikator Kinerja** berupa **Persentase kenaikan rata-rata nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dalam penyelenggaraan Statistik Sektorial**. Indikator ini mengukur pertumbuhan rata-rata nilai IPS Kementerian/Lembaga mitra unit kerja di Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dibandingkan dengan tahun dasar, serta mencerminkan dampak dari keberhasilan dari pembinaan yang sudah dilakukan oleh unit kerja di Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa. Sumber data diperoleh dari Nilai IPS yang dihimpun oleh Biro Perencanaan.

Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja yang menjadi lingkup tugas dan tanggung jawab Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, beserta target kinerjanya pada periode 2025–2029, disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan pemanfaatan data dan <i>insight</i> Statistik Distribusi dan Jasa yang Berkualitas	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Distribusi dan Jasa	Persen	95,00	95,60	96,20	96,80	97,40
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa yang Berkualitas	Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	25,27	33,85	33,85	43,57	43,57

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Target setiap sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja pada awal tahun. Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen pernyataan komitmen pimpinan organisasi/unit kerja yang berisi target kinerja yang harus dicapai dalam periode tertentu. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025 merupakan target kinerja tahun pertama dari Renstra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa periode 2025-2029. Target Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Peningkatan Pemanfaatan Data dan <i>Insight</i> Statistik Distribusi dan Jasa yang Berkualitas	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Distribusi dan Jasa	Persen	95,00



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa yang Berkualitas	Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	25,27

Untuk mewujudkan sasaran dan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa mendapat dukungan anggaran dari APBN sebesar 132,54 miliar rupiah (sebagaimana tercantum dalam dokumen Pernyataan Perjanjian Kinerja) yang digunakan untuk melaksanakan tiga kegiatan melalui Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Rincian dukungan anggaran menurut kegiatan tahun 2025

Tabel 4. Program Anggaran Awal Tahun 2025 Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa

Program/Kegiatan	PAGU (rupiah)
(1)	(2)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	
2902 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi	122.850.723.000
2903 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	5.737.008.000
2908 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	3.952.881.000
Total	132.540.612.000

2.4. Dukungan BPS Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

Prioritas Nasional

Prioritas Nasional memerlukan dukungan data statistik yang akurat, mutakhir, dan terpercaya sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan. Dalam hal ini, Badan Pusat Statistik (BPS) berperan strategis sebagai penyedia data resmi negara yang menjadi rujukan utama pemerintah dalam mengukur capaian pembangunan pada berbagai bidang prioritas. Melalui penyelenggaraan statistik dasar dan penguatan statistik sektoral, BPS

mendukung tersedianya informasi yang berkualitas guna memastikan setiap Prioritas Nasional dilaksanakan secara terukur, tepat sasaran, dan berbasis bukti.

1. Pembinaan Statistik Sektoral

Sejalan dengan Visi BPS 2025–2029, yaitu “Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, salah satu misi yang ditetapkan BPS adalah Memperkuat Kepemimpinan BPS dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). Misi ini menegaskan peran BPS dalam memastikan bahwa data yang dihasilkan berbagai instansi pemerintah memenuhi standar, konsisten, dan terintegrasi untuk mendukung kebijakan berbasis data.

Peran BPS dalam pembinaan statistik sektoral memiliki dasar hukum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang mengamanatkan BPS untuk melakukan pembinaan kepada penyelenggara kegiatan statistik dalam rangka pengembangan Sistem Statistik Nasional dan mendukung pembangunan nasional. Pelaksanaan pembinaan kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/Pemda) dilaksanakan oleh Tim Pembina Statistik Sektoral (Tim PSS) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang bertugas melakukan sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota sebagai lokus pembinaan.

Unit kerja eselon II di bawah Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa turut berperan aktif dalam penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral, khususnya sebagai pembina statistik sektoral pada 18 kementerian/lembaga. Direktorat Statistik Distribusi membina enam K/L antara lain: Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Keuangan Kementerian PAN RB, dan Badan Narkotika Nasional. Direktorat Statistik Distribusi membina enam K/L, yaitu Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi, Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Narkotika Nasional. Direktorat Statistik Harga membina enam K/L, antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Badan Kepegawaian Negara, serta Badan Riset dan Inovasi



Nasional. Selanjutnya, Direktorat Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata membina enam K/L, yaitu Kementerian Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Digital, TVRI, RRI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Kementerian Ekonomi Kreatif.

Pembinaan statistik sektoral yang dilakukan meliputi identifikasi kegiatan statistik di K/L binaan, penjelasan terkait materi evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral (EPSS), dan materi tematik yang berbeda setiap tahunnya.

2. Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi

Dalam rangka mendukung sasaran program prioritas berupa terkendalinya tingkat inflasi nasional sesuai dengan fundamental ekonomi, serta sasaran kegiatan prioritas terkait terjaganya komponen inflasi harga bergejolak, Direktorat Statistik Harga sebagai unit kerja di bawah Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, telah melaksanakan berbagai aktivitas strategis secara menyeluruh dan berkesinambungan. Upaya tersebut diawali dengan perencanaan anggaran serta penyiapan instrumen pendataan dan metodologi, termasuk penyempurnaan instrumen pengolahan data dan penyiapan petugas, guna memastikan terselenggaranya kegiatan statistik harga yang mampu menghasilkan data indeks harga, inflasi dan andil inflasi yang akurat, konsisten dan terpercaya.

Data tingkat inflasi yang dirilis oleh Direktorat Statistik Harga tersedia dalam beberapa level indeks harga, yaitu Harga Produsen, Harga Perdagangan Besar, Harga Konsumen dan Harga Perdesaan. Penyediaan data tingkat inflasi tersebut diterbitkan secara bulanan maupun triwulanan, melalui Berita Resmi Statistik (BRS). Dalam proses penghitungannya, dilaksanakan harmonisasi dan rekonsiliasi antar level harga untuk menjaga konsistensi, integritas dan validitas output yang dihasilkan. Di samping itu, penguatan infrastruktur pendukung terus dilakukan melalui penyediaan dan pemanfaatan instrumen pengumpulan data berbasis aplikasi FASIH serta penyempurnaan instrumen diseminasi guna mendukung efektivitas publikasi dan promosi data inflasi.

Penjaminan kualitas juga dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan baik melalui evaluasi internal maupun eksternal. Evaluasi internal berupa rapat evaluasi pada semua kegiatan statistik harga dan penerapan *Quality Gates* pada beberapa kegiatan statistik harga antara lain Survei Harga Konsumen, Survei Harga Perdagangan Besar, dan Survei

Harga Perdesaan. Sedangkan evaluasi eksternal dilaksanakan melalui mekanisme *Sistem Informasi Quality Assurance Framework (SIQAF)* BPS pada Survei Harga Konsumen, Survei Harga Perdagangan Besar, dan Survei Harga Perdesaan sehingga proses dan output statistik yang dihasilkan tetap memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

3. Pemanfaatan Big Data untuk Statistik Resmi

Pemanfaatan Big Data untuk statistik resmi bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk menghasilkan data yang lebih cepat, detail, dan efisien. Di Indonesia, hal ini menjadi prioritas nasional guna mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence based policy*). Melalui pemanfaatan Big Data, diharapkan statistik resmi dapat menggambarkan dinamika sosial dan ekonomi secara lebih cepat (*real time*), granularitas yang tinggi dan mengurangi biaya yang dikeluarkan sehingga mampu menjawab kebutuhan data yang semakin kompleks.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa telah memanfaatkan big data dalam beberapa kegiatan antara lain:

- a. Statistik Pariwisata: Pemanfaatan *Mobile Positioning Data (MPD)* untuk dapat melacak pergerakan wisatawan nusantara, wisatawan nasional dan wisatawan mancanegara.
- b. Statistik Harga: penggunaan *web scraping* untuk pengumpulan data harga beberapa komoditas dari situs *marketplace*.

Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional merupakan berbagai tantangan dan peluang utama yang perlu mendapat perhatian serius dalam penyelenggaraan pembangunan nasional. Isu-isu tersebut memiliki dampak luas terhadap pencapaian tujuan pembangunan dan memerlukan penanganan yang terintegrasi, berbasis data, serta berorientasi pada hasil. Penetapan isu strategis nasional menjadi dasar dalam perumusan kebijakan, penentuan prioritas program, dan pengalokasian sumber daya agar pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan isu strategis nasional yang pelaksanaannya berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, yang menegaskan sensus sebagai instrumen utama dalam penyediaan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik. Dalam pelaksanaan SE2026, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa memegang peran strategis dan



substantif dalam perumusan kebijakan teknis sensus, termasuk penyusunan desain konseptual, pengembangan konsep dan definisi statistik, penetapan variabel dan klasifikasi kegiatan ekonomi, serta perancangan metodologi pengumpulan dan pengolahan data, khususnya pada sektor distribusi dan jasa.

Sensus Ekonomi Tahun 2026 (SE2026) bertujuan untuk mengumpulkan data dasar dari seluruh usaha/perusahaan. SE2026 memainkan peranan penting dalam penyusunan rencana dan kebijakan yang tepat di bidang ekonomi, baik oleh pemerintah maupun swasta. Data yang dihasilkan SE2026 menjadi bagian dari sistem pengumpulan data ekonomi terintegrasi. SE2026 akan menghasilkan statistik ekonomi dalam bentuk tabular sekaligus geospasial sehingga dapat menjawab kebutuhan data di level nasional maupun level global. Oleh karena itu, data yang dihasilkan menjadi komprehensif yang dapat memenuhi data-data kewilayahan.

2.5. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa menjalankan Program Pengembangan dan Informasi Statistik (PPIS). Program tersebut bertujuan menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Setiap program dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit Eselon II di lingkungan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa.

Kebutuhan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa tahun 2025-2029 diwadahi dalam program teknis PPIS dengan 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

1. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi;
2. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga; dan
3. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata.

Nilai total pagu awal Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa pada tahun 2025 yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) adalah sebesar Rp 132.540.612.000,-. Pagu awal tersebut dialokasikan ke dalam tiga kegiatan, sebagai berikut:

- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi sebesar Rp 122.850.723.000,-
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga sebesar Rp 5.737.008.000,-

- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata sebesar Rp 3.952.881.000,-

Setelah dilakukan revisi terakhir pada tahun 2025, total pagu anggaran Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa adalah sebesar Rp 255.740.842.000,- yang kemudian dilakukan *self blocking* sesuai dengan kebijakan yang berlaku sebesar Rp 210.472.230.000,- sehingga total pagu yang dapat digunakan oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa sebesar Rp 45.268.612.000,-. Pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan yang dapat digunakan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi sebesar Rp 44.230.097.000,-
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga sebesar Rp 326.837.000,-
- Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata sebesar Rp 711.678.000,-

Tabel 5. Pagu Anggaran Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025

Program/Kegiatan	Pagu Awal Tahun 2025	Pagu Setelah Revisi Terakhir 2025	Self Bloking Tahun 2025	Pagu Anggaran Yang Dapat Digunakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi	122.850.723.000	245.819.783.000	201.589.686.000	44.230.097.000
Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	5.737.008.000	5.654.412.000	5.327.575.000	326.837.000
Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	3.952.881.000	4.266.647.000	3.554.969.000	711.678.000
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	132.540.612.000	255.740.842.000	210.472.230.000	45.268.612.000



BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

1. Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Tahun 2025
2. Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra
3. Capaian Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025
4. Prestasi dan Inovasi
5. Realisasi dan Efisiensi Anggaran

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan analisis keterkaitan antara sasaran strategis program dan kegiatan, indikator kinerja, pengukuran capaian kinerja, dan evaluasi capaian kinerja selama satu tahun periode. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi/unit kerja dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini disajikan uraian tingkat ketercapaian dari seluruh sasaran strategis beserta indikator kerjanya serta realisasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

3.1 Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025

Capaian kinerja tahun 2025 merupakan representasi dari Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dalam mencapai dua sasaran strategis yang diukur dalam dua Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan akhir tahun 2025. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPS. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing sasaran. Indikator kinerja tersebut merupakan indikator kinerja yang telah ditetapkan targetnya pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun kinerja tahun 2025 merupakan kinerja tahun pertama Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dalam periode Renstra 2025–2029.

Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa merupakan hasil kinerja secara kolektif dari seluruh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa. Dilihat dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tahun 2025, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa telah berkinerja dengan baik. Hal ini tercermin dari realisasi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Sampai dengan bulan Desember 2025, hasil monitoring menunjukkan bahwa capaian indikator sasaran Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa mencapai 98,40 persen (Tabel 6). Tingkat capaian kinerja sebesar 98,40 persen menunjukkan bahwa sebagian besar target telah tercapai, meskipun masih terdapat indikator yang belum mencapai target secara penuh.

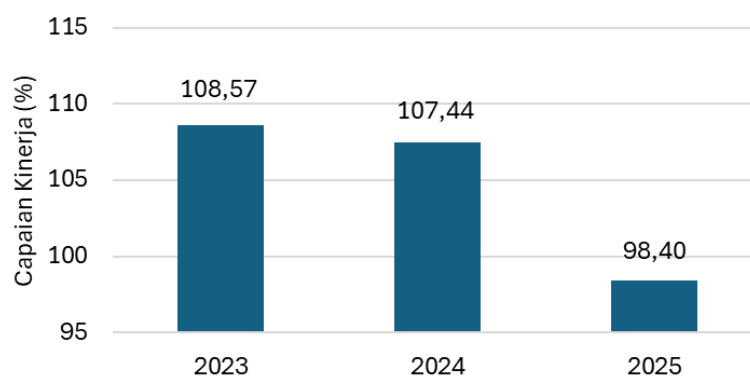


Tabel 6. Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)
1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan Insight yang Relevan		
1.1. Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Distribusi dan Jasa	1	96,80
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien		
2.1. Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektor Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa	1	100,00
KINERJA INDIKATOR SASARAN		98,40

1. Capaian Kinerja Total selama 2023–2025

Selama periode 2023-2025, capaian kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa cenderung mengalami penurunan. Perkembangan capaian kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan jasa dalam 3 tahun terakhir ditunjukkan dalam Gambar 5. Penurunan capaian kinerja ini terlihat dari capaian kinerja tahun 2025 sebesar 98,40 persen. Hasil ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2024, yang masing-masing mencapai 108,57 persen dan 107,44 persen.



Gambar 5. Perkembangan Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2023–2025

Penurunan capaian kinerja pada tahun 2025 tidak sepenuhnya disebabkan oleh penurunan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan, melainkan dipengaruhi oleh perubahan indikator kinerja yang digunakan. Penetapan target Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 mengacu pada

Rancangan Awal Rencana Strategis Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Periode 2025 – 2029, sehingga indikator dan target kinerja yang digunakan berbeda dan relatif lebih menantang dibandingkan periode sebelumnya. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada periode berikutnya.

2. Nilai PKO Tahun 2025 dan Predikat Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (PKO), yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Predikat PKO digolongkan menjadi lima, dimana pembagiannya adalah sebagai berikut:

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)	PREDIKAT PKO
$X > 100\%$	ISTIMEWA
$80\% < X \leq 100\%$	BAIK
$60\% < X \leq 80\%$	BUTUH PERBAIKAN
$20\% < X \leq 60\%$	KURANG
$0\% \leq X \leq 20\%$	SANGAT KURANG

Gambar 6. Predikat PKO Berdasarkan Nilai Kinerja Organisasi

Predikat Kinerja Organisasi	Interpretasi
ISTIMEWA	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat memuaskan dan di atas ekspektasi. Praktik baik ini dapat menjadi contoh bagi organisasi/unit lain.
BAIK	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.
BUTUH PERBAIKAN	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah cukup baik namun masih dibawah ekspektasi/target.
KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih kurang dan masih dibawah ekspektasi/target.
SANGAT KURANG	Tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja masih sangat kurang dan dibawah ekspektasi/target.

Gambar 7. Interpretasi PKO



Nilai koreksi normalisasi capaian PK untuk penghitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) berdasarkan pada predikat AKIP yang dicapai oleh unit kerja. Nilai SAKIP Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa pada tahun 2025 mencapai 70,50 dengan predikat AKIP yaitu BB/Sangat Baik. Dengan predikat AKIP tahun 2025 yaitu BB/Sangat Baik maka nilai koreksi normalisasi capaian PK pada Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa sebesar 10 persen. Capaian Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) 2025

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025	Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)		
		Normalisasi Capaian PK *)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP **)	Nilai Akhir Capaian PK = (3)×(100%-(4))
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.3.0.1 Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Distribusi dan Jasa	96,80	96,80	10%	87,12
2.3.0.1 Persentase kenaikan rata-rata nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dalam penyelenggaraan Statistik Sektor	100,00	100,00	10%	90,00
Total Capaian PK				177,12
NKO Rata-rata Capaian PK				88,56
Predikat PKO				BAIK

Catatan:

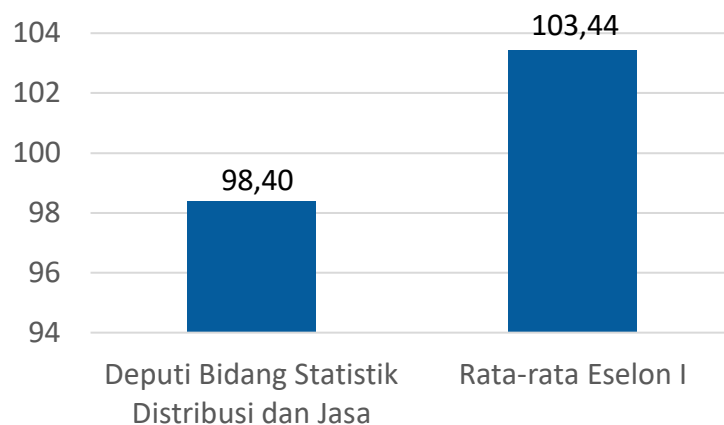
*Jika nilai capaian kinerja ≥ 100 , maka normalisasi capaian PK sebesar 110

**Jika nilai SAKIP = BB/Sangat Baik, maka koreksi normalisasi capaian PK sebesar 10%

Nilai akhir capaian PK tahun 2025 pada indikator 1.3.0.1 Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Distribusi dan Jasa sebesar 87,12 persen dan indikator 2.3.0.1 Persentase kenaikan rata-rata nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dalam

penyelenggaraan Statistik Sektoral sebesar 90,00 persen. Sehingga total capaian PK mencapai 177,12. Nilai Kinerja Organisasi rata-rata capaian PK pada Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa sebesar 88,56 dengan predikat “Baik”. Predikat tersebut menunjukkan bahwa tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa sudah baik dan sesuai ekspektasi. Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa telah mampu melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan serta mendukung pencapaian tujuan organisasi, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam rangka peningkatan efektivitas dan konsistensi capaian kinerja ke depan.

3. *Benchmarking* Capaian Kinerja terhadap Rata-rata



Gambar 8. Perbandingan Capaian Kinerja Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dengan Rata-rata Eselon I Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas, Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa memiliki kinerja lebih rendah dibandingkan rata-rata capaian kinerja Eselon I. Hasil *benchmarking* menunjukkan bahwa capaian kinerja Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa pada tahun 2025 sebesar 98,40 persen berada di bawah nilai rata-rata capaian kinerja Eselon I sebesar 103,44 persen. Rendahnya capaian kinerja Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dipengaruhi oleh salah satu indikator yang realisasinya tidak sesuai target yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil tersebut, Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa telah mengidentifikasi upaya perbaikan kinerja yang dapat diterapkan, yaitu meminta daftar para pengguna data bidang statistik distribusi dan jasa (khususnya Kementerian, Lembaga, dan Instansi) yang tidak



digunakan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi ke Tim pengampu SKD. Daftar ini akan digunakan sebagai acuan untuk mendorong K/L terkait untuk memanfaatkan data statistik distribusi dan jasa.

4. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja per Sasaran Tahun 2023-2025

Sasaran Strategis 1. Peningkatan pemanfaatan data dan *insight* Statistik Distribusi dan Jasa yang berkualitas

Pada sasaran ini, target Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Distribusi dan Jasa ditetapkan sebesar 95,00 persen, dengan realisasi sebesar 91,96 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 96,80 persen. Capaian ini belum sepenuhnya optimal disebabkan oleh penetapan target pada fase awal penerapan indikator baru sehingga *baseline* historis yang digunakan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual. Hal tersebut menyebabkan target yang ditetapkan berada di atas kapasitas capaian realistis pada tahun berjalan, sehingga realisasi kinerja berada di bawah target yang telah ditetapkan meskipun secara substantif kinerja tetap menunjukkan hasil yang baik.

Sasaran Strategis 2. Terwujudnya penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga mitra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa

Target persentase kenaikan rata-rata nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kementerian/Lembaga mitra ditetapkan sebesar 25,27 persen, dengan realisasi sebesar 25,27 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen. Capaian ini didasarkan pada penggunaan hasil penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024 sebagai dasar pengukuran kinerja tahun 2025.

Tabel 8. Perbandingan Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja per Sasaran Tahun 2023-2025

Sasaran Program / Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025*)	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Sasaran 1. Peningkatan pemanfaatan data dan insight Statistik Distribusi dan Jasa yang Berkualitas										
Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Distribusi dan Jasa	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)	95,00	N/A (Belum dijadikan indikator)	91,96	N/A (Belum dijadikan indikator)	96,80			
Sasaran 2. Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektorial Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa										
Persentase kenaikan rata-rata nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dalam penyelenggaraan Statistik Sektorial	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)	25,27	N/A (Belum dijadikan indikator)	25,27	N/A (Belum dijadikan indikator)	100,00			

5. Analisis capaian kinerja 2025 per IKU

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, serta mendukung tercapainya kebijakan di level BPS, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa menetapkan 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis yang mencerminkan hasil (output) dari program dan kegiatan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa pada tahun 2025. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:



Tujuan 1: Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan *Insight* yang Relevan

Tujuan ini merupakan fondasi utama dalam mencapai Visi BPS. Dengan menghasilkan statistik berkualitas dan menyediakan wawasan yang relevan, BPS mendukung penyusunan kebijakan yang berbasis bukti. Kebijakan yang disusun dengan data yang tepat dan akurat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap BPS, serta memperkuat peran aktif BPS dalam menyediakan data yang mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Sasaran strategis kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan pertama dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Peningkatan pemanfaatan data dan *insight* Statistik Distribusi dan Jasa yang Berkualitas

Sasaran strategis pertama BPS berfokus pada peningkatan tingkat pemanfaatan data statistik yang tidak hanya berkualitas dari data statistik, tetapi juga dilengkapi dengan *insight* atau wawasan yang relevan untuk mendukung proses perumusan kebijakan publik dan pengambilan keputusan strategis. Sasaran ini mencerminkan upaya BPS dalam memperkuat posisinya sebagai penyedia utama informasi statistik yang dapat dipercaya dan dapat dimanfaatkan secara luas oleh seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, digunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis berupa Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Distribusi dan Jasa. Indikator ini merepresentasikan sejauh mana data statistik resmi yang dihasilkan atau dipublikasikan oleh Unit Kerja di Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa digunakan oleh pihak-pihak yang relevan, seperti pembuat kebijakan, dalam proses perumusan, pengambilan keputusan, atau evaluasi kebijakan nasional. Indikator ini mencerminkan efektivitas distribusi, relevansi, kualitas, dan keberhasilan lembaga dalam menjadikan data statistik resmi yang dipublikasikan BPS sebagai dasar bagi perumusan kebijakan publik.

Tabel 9. Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T1. Mewujudkan Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Berbasis Data Statistik Berkualitas dan <i>Insight</i> yang Relevan					
SS1. Terwujudnya Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik Berkualitas dan <i>Insight</i> dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan					
Peningkatan pemanfaatan data dan <i>insight</i> Statistik Distribusi dan Jasa yang Berkualitas	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Distribusi dan Jasa	Persen	95,00	91,96	96,80
	<u>Indikator Proxy:</u> Persentase pengguna data yang menggunakan data bidang statistik distribusi dan jasa sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi	Persen	99,52	97,35	97,82

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan pemanfaatan data dan *insight* Statistik Distribusi dan Jasa yang berkualitas adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik distribusi dan jasa untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional. Indikator kinerja Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Distribusi dan Jasa ditujukan untuk melihat capaian kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dalam meningkatkan pemanfaatan data dan *insight* statistik distribusi dan jasa yang berkualitas.

Pada tahun 2025, realisasi Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Distribusi dan Jasa sebesar 91,96 persen, lebih rendah dari target yang ditetapkan sebesar 95 persen. Capaian Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Distribusi dan Jasa sebesar 96,80 persen. Dengan demikian, target untuk indikator ini tidak tercapai. Dalam mencapai indikator kinerja ini, target Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Distribusi dan Jasa terdiri dari dua komponen. Komponen pertama yaitu Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Dokumen Pemerintah (TPDS-dp) dengan bobot 80



persen, terealisasi 95,83 persen dari target 95 persen. Sedangkan komponen kedua yaitu Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Menurut Persepsi Pengguna (TPDS_u) dengan bobot 20 persen, terealisasi 76,47 persen dari target 95 persen. Pencapaian di bawah penetapan target disebabkan fase awal penerapan indikator baru sehingga *baseline* historis yang digunakan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi aktual. Hal tersebut menyebabkan target yang ditetapkan berada di atas kapasitas capaian realistis pada tahun berjalan meskipun secara substantif kinerja tetap menunjukkan hasil yang baik.

Kendala:

- a. Indikator/data statistik yang dihasilkan tidak muncul secara langsung dalam dokumen resmi pemerintah, padahal data tersebut digunakan dalam penghitungan PDB (misal PDB Transportasi).
- b. Dokumen Renstra K/L belum ada yang terbaru (2025-2029) dan Survei Kebutuhan Data (SKD) hasilnya dirilis setiap akhir tahun, sehingga tidak dapat disajikan realisasi secara triwulanan.
- c. Masih ada beberapa pengguna data yang menggunakan data bidang statistik distribusi dan jasa selain sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi. Diperkirakan pengguna data untuk kepentingan bisnis, penelitian, dan pendidikan.

Solusi:

- a. Mengusulkan ke Biro Perencanaan agar mengakomodir data yang menjadi penyusun PDB termasuk dalam data yang digunakan dalam dokumen pemerintah.
- b. Meminta daftar para pengguna data bidang statistik distribusi dan jasa yang tidak digunakan sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi ke DDS sebagai pengampu SKD (khususnya daftar Kementerian, Lembaga, dan Instansi). Daftar ini akan digunakan sebagai acuan untuk mendorong para K/L terkait untuk memanfaatkan data statistik distribusi dan jasa.

Tindak Lanjut:

- a. Berkoodinasi dan komunikasi dengan Tim pengampu SKD.
- b. Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan kementerian/lembaga pengguna untuk mendorong peningkatan pemanfaatan data statistik distribusi dan jasa dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi.



Tujuan 2: Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien

Keberhasilan BPS dalam menyediakan data berkualitas tidak terlepas dari peran Sistem Statistik Nasional (SSN). SSN yang andal, efektif, dan efisien memastikan integrasi, konsistensi, dan akurasi data yang dihasilkan. Tujuan ini berkontribusi secara langsung pada tercapainya Visi BPS sebagai lembaga terpercaya. Dengan memastikan sistem yang kokoh dan terintegrasi, BPS dapat memperkuat posisi strategisnya dalam menyediakan data yang mendukung proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Hal ini akan meningkatkan peran aktif BPS di berbagai level pemerintahan dan masyarakat.

Sasaran strategis kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan kedua dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ini, digunakan Indikator Kinerja “Persentase Kenaikan Rata-Rata Nilai IPS K/L Mitra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral”. Indikator tersebut merupakan pertumbuhan rata-rata dari nilai IPS K/L Mitra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dari tahun dasar (Tahun 2023), dan indikator dampak dari keberhasilan pembinaan yang sudah dilakukan oleh unit kerja di Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa.

Tabel 10. Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025

Tujuan/Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T1. Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien SS2. Terwujudnya Kualitas Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional yang Baik dan Terpadu					
Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa	Persentase kenaikan rata-rata nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	25,27	25,27	100,00



Pada tahun 2025, Target Persentase kenaikan rata-rata nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kementerian/Lembaga mitra ditetapkan sebesar 25,27 persen, dengan realisasi sebesar 25,27 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen. Dengan demikian, target untuk indikator ini telah tercapai. Capaian ini didasarkan pada penggunaan hasil penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024 sebagai dasar pengukuran kinerja tahun 2025.

Kendala:

- a. Ketika pembinaan statistik sektoral dilakukan, beberapa Kementerian/Lembaga tidak mengikutsertakan tim produsen datanya, hanya tim walidatanya saja dengan alasan adanya kegiatan pekerjaan lain yang tidak dapat ditinggalkan.
- b. Kegiatan pembinaan secara daring memberikan fleksibilitas dan efisiensi, namun belum sepenuhnya efektif untuk mencapai pemahaman yang mendalam terutama pada K/L binaan dengan predikat nilai IPS ""kurang"" atau ""cukup"".

Solusi:

- a. Membuat surat resmi permintaan waktu untuk indentifikasi kegiatan statistik dan secara berkesinambungan melakukan koordinasi lebih intens dengan K/L terkait guna memastikan kesesuaian waktu dan efektivitas.
- b. Penyampaian materi dibuat lebih interaktif dengan materi yang lebih menarik serta menegaskan kepada K/L binaan bahwa dalam pembahasan pembinaan statistik sektoral diwajibkan untuk mengikutsertakan tim walidata dan produsen datanya, karena keterlibatan walidata dan produsen data merupakan salah satu penilaian dalam capaian penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral.

Tindak Lanjut:

- a. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga yang dibina.
- b. Melakukan penyusunan jadwal dan perencanaan kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral (PSS) secara luring, sejak awal tahun anggaran.



3.2 Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Terhadap Target Renstra 2025-2029

Capaian Kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa selama tahun 2025 dibandingkan dengan target Renstra 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11. Sasaran Program, Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja 2025 dan 2029

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Target 2029*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Capaian Terhadap Target 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran 1. Peningkatan pemanfaatan data dan <i>insight</i> Statistik Distribusi dan Jasa yang Berkualitas						
Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Distribusi dan Jasa	Persen	95,00	97,40	91,96	96,80	94,41
Sasaran 2. Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa						
Persentase kenaikan rata-rata nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	25,27	43,57	25,27	100,00	58,00

*) Diambil dari Target Renstra sesuai surat Plt. Sestama Nomor B-142/02000/PR.110/2025 tanggal 14 Maret 2025, hal: Penyampaian Metadata IKU, Konfirmasi Baseline, Target IKU 2025-2029, dan Indikator Proksi IKU



Sasaran 1. Peningkatan pemanfaatan data dan *insight* Statistik Distribusi dan Jasa yang Berkualitas

Target Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Distribusi dan Jasa tahun 2025 yaitu 95,00 persen dan realisasinya sebesar 91,96 persen. Oleh karena itu, capaian terhadap target tahun 2025 tidak tercapai, yaitu dengan nilai capaian sebesar 96,80 persen. Sedangkan capaian tahun 2025 terhadap target tahun 2029 belum tercapai, yaitu sebesar 94,41 persen.

Faktor yang menghambat ketercapaian target diantaranya masih ada beberapa pengguna data yang menggunakan data bidang statistik distribusi dan jasa selain sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi, yang diperkirakan pengguna data untuk kepentingan bisnis, penelitian, dan pendidikan. Perlu memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan kementerian/lembaga pengguna untuk mendorong peningkatan pemanfaatan data statistik distribusi dan jasa dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi.

Sasaran 2. Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa

Target Persentase kenaikan rata-rata nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral tahun 2025 yaitu 25,27 persen dan realisasinya sebesar 25,27 persen. Oleh karena itu, target tercapai terhadap target tahun 2025, yaitu dengan nilai capaian sebesar 100,00 persen. Sedangkan capaian tahun 2025 terhadap target tahun 2029 belum tercapai, yaitu baru mencapai 58,00 persen.

Faktor yang menghambat ketercapaian target antara lain pada saat pembinaan statistik sektoral dilakukan, beberapa kementerian/lembaga tidak mengikutsertakan tim produsen datanya, hanya tim Walidatanya saja dengan alasan adanya kegiatan pekerjaan lain yang berbarengan waktunya dan tidak dapat ditinggalkan. Hal ini menyebabkan kegiatan pembinaan belum sepenuhnya efektif. Upaya yang dilakukan yaitu dengan penyampaian materi pembinaan statistik sektoral dibuat lebih interaktif dengan materi yang lebih menarik serta menegaskan bahwa kementerian/lembaga diwajibkan untuk mengikutsertakan tim walidata dan produsen datanya, karena keterlibatan keduanya merupakan salah satu penilaian dalam capaian penyelenggaraan pembinaan statistik sektoral.

3.3 Capaian Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

Output yang Sudah Dihasilkan

Output prioritas nasional merupakan hasil kegiatan strategis yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui penyediaan data dan informasi yang berkualitas, relevan, dan tepat waktu guna mendukung perumusan serta evaluasi kebijakan pembangunan. Output yang dihasilkan oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dalam rangka mendukung capaian prioritas nasional, prioritas Presiden, dan isu strategis nasional selama Tahun 2025 disajikan pada Tabel 12 berikut.

Tabel 12. Output yang dihasilkan

No.	Prioritas Nasional/ Prioritas Presiden	Output yang dihasilkan
(1)	(2)	(3)
1	Pembinaan Statistik Sektoral	<ul style="list-style-type: none"> - Terselenggaranya kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral kepada K/L berupa pertemuan secara <i>online</i> maupun tatap muka secara langsung di BPS RI dan pelaksanaan <i>fullday meeting</i>. - Tingkat Penyelenggaraan Pembinaan Statistik Sektoral di Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa sesuai standar dan bernilai baik.
2.	Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi	<ul style="list-style-type: none"> - Data inflasi nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang dirilis setiap bulan berupa Berita Resmi Statistik (BRS). - Publikasi data inflasi yang terbit setiap tahun.
3.	Sensus Ekonomi 2026	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Persiapan Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, yang mencakup kerangka kerja, instrumen dan strategi teknis pendataan. - Melakukan Uji Coba Cepat (UCC) instrumen di lingkungan internal dengan melibatkan pegawai BPS baik sebagai petugas pendataan maupun sebagai pelaku usaha. - Melaksanakan uji coba pendataan lengkap dan pengujian kuesioner final di tiga Kabupaten/Kota terpilih menggunakan kuesioner yang telah mengintegrasikan data sosial ekonomi hingga level anggota keluarga.



Kendala, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut per Prioritas

Sementara itu, berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan setiap prioritas selama tahun 2025, beserta solusi yang telah dilakukan, dan rencana tindak lanjut yang dirancang untuk memastikan pencapaian target secara optimal, disajikan secara rinci pada Tabel 13 berikut.

Tabel 13. Kendala, Solusi, dan Rencana Tindak Lanjut per Prioritas

No	Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden	Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembinaan Statistik Sektoral	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlambatan pemberian jadwal identifikasi kegiatan dari K/L Mitra - Kurangnya antusiasme peserta K/L Mitra pada saat pembinaan - Kesalahan pelaporan pada aplikasi pembinaan statistik sektoral 	<ul style="list-style-type: none"> - Komunikasi dan koordinasi dengan K/L Mitra baik secara informal maupun formal - Penyampaian materi dibuat lebih interaktif - Pemeriksaan ulang terkait proses pelaporan pada aplikasi pembinaan statistik sektoral 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Koordinasi dengan K/L Binaan - Menyiapkan rencana kegiatan PSS sesuai dengan anggaran yang tersedia
2.	Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada beberapa K/L yang memberikan data pendukung penghitungan inflasi - <i>Webentry</i> dan pengolahan yang masih belum sempurna - Manajemen SDM dan waktu 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan PKS baru - Melakukan koordinasi dengan Tim IPD untuk penyempurnaan seluruh <i>webentry</i> Survei Harga dan Kegiatan Statistik Harga lainnya - Manajemen waktu dan SDM dengan lebih ketat 	<ul style="list-style-type: none"> - Finalisasi Penyusunan PKS BPS dan Kementerian Komdigi - Melakukan koordinasi dengan Tim IPD untuk penyempurnaan seluruh <i>webentry</i> Survei Harga dan Kegiatan Statistik Harga lainnya - Matriks manajemen SDM
3.	Sensus Ekonomi 2026	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi anggaran pada kegiatan strategis berdampak pada pelaksanaan Gladi Bersih (GB) yang tertunda pada 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan penjadwalan ulang dan harmonisasi kegiatan prioritas agar tetap berjalan efektif menyesuaikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan mitigasi risiko pelaksanaan SE2026 berdasarkan hasil kegiatan yang telah dilakukan di tahun 2025.

No	Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden	Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>Triwulan I. Selain itu, kondisi tersebut berdampak pada cakupan Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat) yang belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kuesioner SE2026 yang dinamis menuntut proses pengujian berulang untuk memastikan validitas data. Hal ini berimplikasi pada perlunya penghitungan ulang estimasi waktu pencacahan (<i>interview time</i>) yang berdampak langsung pada perubahan proyeksi kebutuhan jumlah petugas lapangan. 	<p>dengan ketersediaan pagu anggaran.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan strategi <i>targeting</i> pada kegiatan pemutakhiran kerangka geospasial dan Wilkerstat, dengan memprioritaskan kabupaten/kota yang berada di luar cakupan kegiatan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) 2023. - Melakukan Uji Coba Cepat (UCC) instrumen di lingkungan internal dengan melibatkan pegawai BPS baik sebagai petugas pendataan maupun sebagai pelaku usaha. - Melaksanakan uji coba pendataan lengkap dan pengujian kuesioner final di tiga kabupaten/kota terpilih menggunakan kuesioner yang telah mengintegrasikan data sosial ekonomi hingga level anggota keluarga. - Melakukan pengolahan paradata dari pengujian kuesioner untuk menghasilkan estimasi waktu pendataan yang presisi. Hasil ini kemudian digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan finalisasi instrumen, kebutuhan petugas, dan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan SE2026 sesuai anggaran yang tersedia. - Melakukan reviu <i>network planning</i> (NWP) kegiatan SE2026.



No	Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden	Kendala	Solusi	Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			sebagai basis penghitungan beban kerja dan kebutuhan riil petugas lapangan.	

3.4 Prestasi dan Inovasi Unit Kerja

Berbagai prestasi yang berhasil dicapai oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa pada tahun 2025 antara lain:

1. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa hadir sebagai perwakilan dalam pertemuan-pertemuan pimpinan (*high level meetings*) di level global:
 - a. *The 29th Meeting of The Wiesbaden Group on SBR* (Johannesburg, Afrika Selatan, 26 - 31 Oktober 2025);
 - b. *10th Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX) Global Conference: Smarter Data for Better Insights* (Roma, Italia, 29 September – 3 Oktober 2025).
2. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa menghadiri berbagai kegiatan statistik di level internasional, diantaranya adalah :
 - a. *Workshop on Machine Learning for Official Statistics in Asia-Pacific Countries* (Jakarta, 3 – 7 Februari 2025);
 - b. *Meeting of the Task Team on International Trade Statistics* (Marakesh, Maroko, 6 – 9 Mei 2025);
 - c. *The 11th Working Group on International Merchandise Trade Statistics (WGIMTS11) Meeting* (Jakarta, 23 – 24 Juli 2025);
 - d. *Expert Forum for Data Users and Producers Climate Related Statistics* (Geneva, Swiss, 1 – 3 September 2025);
 - e. *Workshop on Functional and Performance Testing in Preparation of Economic Census* (Canberra, Australia, 1 – 5 September 2025);
 - f. *World Expo 2025* (Osaka, Jepang, 6 – 13 Oktober 2025);
 - g. *Global Advanced Technology, AI and Cybersecurity Leadership* (Uni Emirat Arab, 14 November 2025);

- h. *Workshop on SDG Indicator 12.3.1a Food Lost Index* (Jakarta, 9 – 12 Desember 2025);
 - i. *The 4th Meeting of the Committee on Trade in Goods Indonesia-Australia CEPA* (Jakarta, 11 Desember 2025);
 - j. *Speaker dalam APEC Workshop on Leveraging Data and Analytical Tools to Support Trade and Trade Policy Analysis* (Incheon, South Korea), 8 – 9 Agustus 2025);
 - k. *Resource person dalam Short Course on MPD Processing and Analytics for Official Statistics* (Bali, 18 – 25 September 2025);
 - l. *Task Group on Measuring E-commerce Value (TG-eCOM) dan Working Group on Measuring E-Commerce and the Digital Economy, 6th Meeting* (Geneva, Swiss, 2 – 5 Desember 2025).
3. Penerima penghargaan Terbaik Pertama dalam Top 3 Inovasi Pelayanan Publik melalui *Mobile Positioning Data (MPD): Transformasi Pengumpulan Data Wisatawan Nusantara dalam Era Digital*;
 4. Penerima penghargaan BERKUALITAS pada penilaian Kualitas Data dan Pemanfaatan Data Tahun 2025;
 5. Penerima penghargaan SANGAT MEMUASKAN dalam Pengelolaan Arsip di Lingkup Unit Kerja.

Selain itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa juga memberikan beberapa terobosan inovasi, baik inovasi dari segi teknis kegiatan statistik maupun dari segi pendukung kegiatan statistik. Inovasi-inovasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan *Dashboard* Perdagangan Barang Internasional (PBI)
Pengembangan *dashboard* ini dilakukan oleh Tim Perdagangan Barang Internasional yang ditujukan untuk mengakomodasi penyajian data statistik ekspor impor yang bersifat besar dan multidimensi sehingga data dapat ditampilkan secara cepat, ringkas, akurat, interaktif, dan mudah diakses. Hingga saat ini *dashboard* PBI sudah menyediakan data ekspor-impor yang sudah terintegrasi dengan beberapa fitur dasar seperti *data filtering*, data tren, penghitungan pertumbuhan *year on year (y-on-y)*, *month to month (m-to-m)*, dan *cummulative to cummulative (c-to-c)*, dan lain sebagainya. Untuk kedepannya *dashboard* PBI akan terus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan data detail sektor-komoditas dan pemenuhan *dashboard* khusus provinsi.



2. Pengembangan Aplikasi D-Stat Indeks *Unit Value* (IUV).

Aplikasi D-Stat IUV saat ini masih dalam tahap pengembangan sebagai solusi strategis untuk mengatasi kompleksitas penghitungan IUV ekspor dan impor. Kehadiran aplikasi ini ditargetkan mampu mengakselerasi proses pengolahan data menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien sehingga menjamin ketepatan waktu rilis publikasi. Sebagai tambahan informasi, IUV merupakan indikator proksi harga ekspor dan impor barang yang dirilis setiap bulan sebagai produk komplemen (*by product*) dari penyusunan statistik perdagangan internasional.

3. Pengembangan *Dashboard* Analisis Perdagangan Antar Wilayah (PAW).

Pengembangan *Dashboard* Analisis PAW dilakukan oleh Tim Survei Perdagangan Barang Domestik sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan data statistik. Melalui *dashboard* ini, penyajian data transaksi antarwilayah dapat dilakukan secara menarik, serta lebih menarik, cepat, dan tepat waktu. Sebagai upaya keberlanjutan, *dashboard* Analisis PAW akan terus dikembangkan agar lebih interaktif dan ramah pengguna (*user friendly*).

4. Aplikasi *Tableau*

Pengembangan Aplikasi *Tableau* dilakukan oleh tim teknis Direktorat Statistik Harga, berupa visualisasi data daring menggunakan *Tableau* telah mempercepat waktu yang dibutuhkan oleh tim Direktorat Statistik Harga dalam menyiapkan bahan rilis, karena perbandingan antarlevel harga dapat dilakukan secara langsung. Kualitas data yang dihasilkan juga meningkat karena analisis data yang dilakukan akan lebih mendalam. Oleh karena itu, dapat dikatakan inovasi visualisasi data *online* dengan *Tableau* menciptakan efisiensi waktu dalam pekerjaan serta meningkatkan kualitas data harga.

5. Penggunaan web konsolidasi dalam kegiatan harmonisasi dan rekonsiliasi data statistik harga setiap bulan, sebagai bahan persiapan untuk Berita Resmi Statistik

6. Penggunaan CAPI pada Survei Volume Penjualan Eceran Beras (SVPEB) dan Survei Volume Komoditas Khusus (SVK)

Kegiatan ini merupakan salah satu modernisasi proses bisnis kegiatan Survei Harga Konsumen yang berguna dalam mempercepat proses pengumpulan data, meningkatkan reabilitas data yang dikumpulkan, memungkinkan pengawasan langsung perbaikan data secara cepat sehingga meningkatkan kualitas data yang dihasilkan. Selain ini penghematan bisa dilakukan karena tidak perlu dilakukan pencetakan kuesioner.



7. *Mobile Positioning Data (MPD)*: Transformasi Pengumpulan Data Wisatawan Nusantara dalam Era Digital.
8. Pemanfaatan *CAWI Self-Enumeration* dalam pengumpulan data karakteristik perjalanan wisatawan nusantara dan wisatawan nasional melalui Survei Digital Wisatawan Nusantara dan Survei Digital Wisatawan Nasional.
9. Analisis pergerakan masyarakat selama masa mudik Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, dan Tahun Baru dengan memanfaatkan MPD.
10. Pembangunan *Dashboard* Perkembangan Perjalanan Wisatawan Nusantara.
11. *CoachMe Program*

Merupakan kegiatan pendampingan dan pembinaan terstruktur yang difokuskan pada pengembangan potensi individu serta peningkatan kinerja pegawai melalui bimbingan personal, penugasan strategis, dan evaluasi berkala. Program ini menciptakan budaya coaching yang berkelanjutan dalam organisasi.
12. *Knowledge Cafe*

Kegiatan ini dijalankan secara rutin dengan basis pendekatan partisipatif dan kolaboratif. Forum ini mendorong pertukaran ilmu, pengalaman, dan praktik baik antarpegawai untuk memperluas wawasan dan mengembangkan kompetensi SDM. *Knowledge Cafe* juga menjadi wadah pemanfaatan pengetahuan internal organisasi.
13. *Funergy (Fun and Energy)*

Kegiatan informal yang dilaksanakan setiap bulan dengan tujuan meningkatkan kebersamaan, memperkuat kerjasama tim, dan menjaga keseimbangan mental dan emosional pegawai dalam lingkungan kerja. Aktivitas ini mencakup permainan tim, sesi motivasi, dan kegiatan relaksasi yang dapat memperkuat solidaritas dan meningkatkan semangat kerja tim.
14. *Coffee Chat*

Kegiatan pengembangan komunikasi dan keterampilan bahasa asing yang diadakan secara berkala. Coffee Chat mendorong terciptanya SDM yang adaptif, terbuka, dan siap bersaing dalam konteks kerja global.
15. *Employee of the Month (EOM)*



Sebagai bentuk apresiasi terhadap pegawai berprestasi dan berkontribusi nyata dalam pencapaian kinerja. EOM memotivasi peningkatan kinerja dan menciptakan budaya kerja yang kompetitif, produktif, serta penuh semangat.

16. KippApp Time

Merupakan sarana evaluasi dan refleksi kinerja yang dilakukan secara rutin. Kegiatan ini mendorong penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan efektivitas pelaksanaan tugas melalui pengukuran dan diskusi capaian individu maupun tim secara sistematis dan terstruktur.

17. GraphiSKTIP

Inovasi dalam visualisasi data kinerja unit kerja secara menarik, ringkas, dan komunikatif. GraphiSKTIP mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas serta menjadi media penyampaian informasi kepada publik secara efektif berbasis data.

3.5 Realisasi dan Efisiensi Anggaran

Sebagaimana DIPA Induk BPS Tahun 2025 Nomor SP DIPA-054.01.1.018576/2025, pagu anggaran Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa ditetapkan sebesar Rp 255.740.842.000,00 untuk pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025. Pada pelaksanaannya, pagu tersebut mengalami revisi menjadi sebesar Rp 45.268.612.000,00 (sesudah *self blocking*). Dari pagu tersebut, realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun 2025 adalah sebesar Rp 38.222.926.631,00 atau tercapai 14,95 persen dari total anggaran (sebelum *self blocking*) dan 84,44 persen dari total anggaran (sesudah *self blocking*).

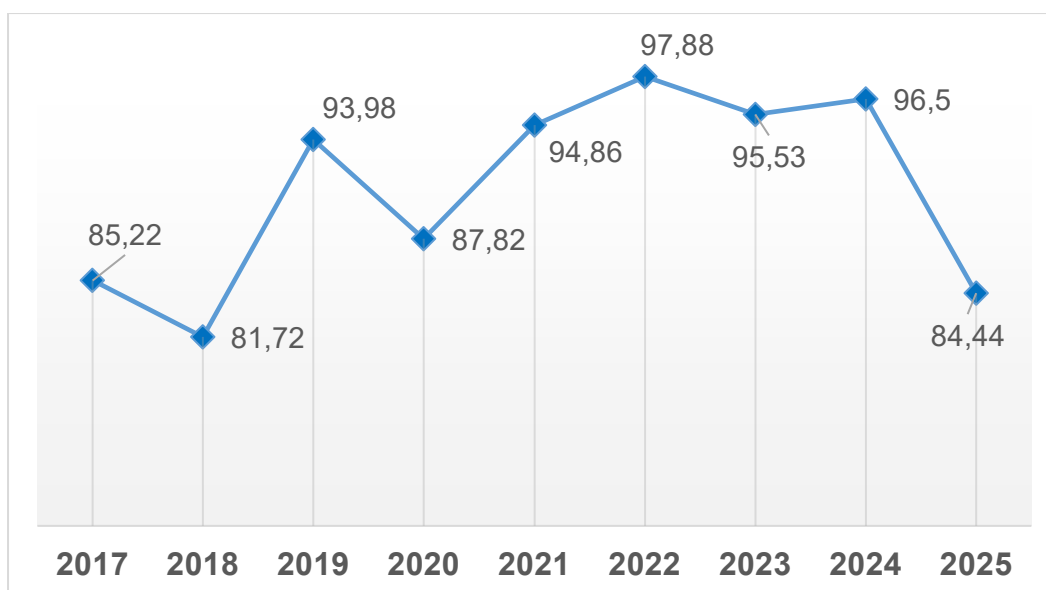
Tabel 14. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025

Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)	Pagu sebelum <i>self blocking</i> (Rp)	Pagu sesudah <i>self blocking</i> (Rp)	Realisasi (Rp)	Kinerja Anggaran sebelum <i>self blocking</i> (%)	Kinerja Anggaran sesudah <i>self blocking</i> (%)
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(5)
SS1. Meningkatkan pemanfaatan statistik bidang distribusi dan jasa yang berkualitas	96,80	254.841.442.000	45.168.112.000	38.154.496.631	14,97	84,47
SS2. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	100,00	899.400.000	100.500.000	68.430.000	7,61	68,09
TOTAL	98,40	255.740.842.000	45.268.612.000	38.222.926.631	14,95	84,44

Kinerja anggaran Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa tahun 2025 cukup baik dengan tingkat penyerapan mendekati 100 persen. Jika dibandingkan antara capaian kinerja dan kinerja anggarannya, persentase realisasi anggaran pada sasaran strategis pertama menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan dengan sasaran strategis kedua, yaitu 84,47 persen. Persentase realisasi anggaran sasaran strategis kedua mencapai 68,09 persen. Anggaran tersebut digunakan dalam kegiatan pembinaan terhadap K/L/D/I sebagai proses tahapan pendahuluan dalam mencapai target indikator sasaran strategis kedua Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa. Capaian kinerja sasaran yang lebih tinggi dibandingkan kinerja anggaran dapat mengindikasikan bahwa Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa berupaya menggunakan dana secara efisien dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Upaya yang dilakukan di Lingkungan Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa adalah optimalisasi penggunaan sistem informasi statistik yang utamanya diimplementasikan dalam tahapan pengumpulan data di lapangan. Selain dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis statistik yang dijalankan, penggunaan sistem informasi tersebut dinilai dapat menyerap anggaran secara lebih efisien karena terdapat beberapa proses bisnis yang mengalami perubahan dari manual menuju *automatic by system*. Dengan demikian, meskipun terdapat penghematan anggaran, Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa tetap dapat mengoptimalkan pencapaian program-program kerja yang telah disusun pada tahun 2025. Hal ini dapat terlihat pada realisasi anggaran sebesar 84,44 persen dan capaian kinerja mencapai 98,40 persen.





Gambar 9. Tingkat Penyerapan Anggaran Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2017-2025

Jika dibandingkan antar tahun, kinerja anggaran tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024. Pencapaian kinerja anggaran tertinggi selama delapan tahun terakhir terjadi pada tahun 2022, sedangkan capaian target realisasi anggaran terendah terjadi pada tahun 2018.

Tabel 15. Realisasi Anggaran Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Menurut Kegiatan Tahun 2025

NO	Kegiatan	Capaian Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Kinerja Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi	107,16	44.230.097.000	37.291.381.991	84,31
2	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	104,37	326.837.000	288.369.629	88,23
3	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	108,03	711.678.000	643.175.011	90,37
TOTAL		98,40	45.268.612.000	38.222.926.631	84,44

Jika dilihat berdasarkan kegiatan, alokasi pagu anggaran terbesar digunakan untuk kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata dengan tingkat penyerapan sebesar 90,37 persen. Secara rinci, realisasi anggaran menurut kegiatan ditampilkan pada Tabel 15.

Tabel 16. Realisasi Anggaran dan Efisiensi menurut Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	Pagu yang dapat digunakan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sasaran 1. Peningkatan pemanfaatan data dan insight Statistik Distribusi dan Jasa yang Berkualitas								
Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Distribusi dan Jasa	Persen	95,00	91,96	96,80	45.168.112.000	38.154.496.631	84,47	1,15
Sasaran 2. Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa								
Persentase kenaikan rata-rata nilai IPS Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	25,27	25,27	100,00	100.500.000	68.430.000	68,09	1,47
Total				98,40	45.268.612.000	38.222.926.631	84,44	1,17

Dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, efisiensi memiliki peran penting dalam memastikan dana yang dialokasikan memberikan dampak optimal terhadap pencapaian kinerja organisasi. Oleh karena itu, tingkat efisiensi anggaran menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur efektivitas pemanfaatan anggaran dalam mencapai sasaran strategis. Cara menghitung tingkat efisiensi anggaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi Anggaran} = \% \text{ capaian kinerja} / \% \text{ realisasi anggaran}$$

Jika ≥ 1 artinya efisien

Jika < 1 artinya tidak efisien



Berdasarkan hasil penghitungan, efisiensi anggaran di Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa sebesar 1,17 persen yang berarti capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan proposi anggaran yang digunakan, hal ini menunjukkan pengelolaan sumber daya yang efektif dan optimal. Demikian juga jika dirinci menurut sasaran strategis, terlihat bahwa pada sasaran 1 yaitu Peningkatan pemanfaatan data dan insight Statistik Distribusi dan Jasa yang Berkualitas terjadi efisiensi sebesar 1,15 dan pada sasaran 2 yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa terjadi efisiensi sebesar 1,47 persen.





BAB 4

Penutup

1. Kesimpulan
2. Rencana Tindak Lanjut

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa tahun 2025 merupakan perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa atas penggunaan anggaran dan sebagai pengukuran dan evaluasi hasil kinerja terhadap capaian kinerja tahun 2025. Secara umum capaian kinerja selama tahun 2025 mencapai 98,40 persen dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 88,56 dengan predikat "Baik" yang menunjukkan bahwa tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi. Realisasi kinerja anggaran tahun 2025 sebesar 38,22 milyar rupiah dengan penyerapan sebesar 84,44 persen dengan efisiensi anggaran sebesar 1,17 persen, menunjukkan optimalisasi penggunaan sumber daya tanpa mengurangi kualitas kinerja yang dihasilkan.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa senantiasa akan melakukan perbaikan dan peningkatan dalam rangka memberikan layanan yang prima dalam mendukung visi dan misi Badan Pusat Statistik.

Adapun beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan rangka peningkatan kinerja antara lain:

- Meningkatkan penggunaan data Bidang Statistik Distribusi dan Jasa untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pada Kementerian/Lembaga melalui kegiatan koordinasi dan komunikasi dengan K/L terkait
- Meningkatkan koordinasi dengan K/L yang menjadi binaan dalam kegiatan Pembinaan Statistik Sektorial dimasing-masing eselon 2 untuk meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
- Penguatan koordinasi antara BPS dan perangkat daerah guna mendukung kelancaran pelaksanaan SE 2026. Sosialisasi kepada pelaku usaha, diperlukan kapasitas SDM yang mumpuni agar proses pendataan berjalan sesuai standar kualitas, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan secara berkala untuk memastikan ketercapaian target cakupan dan kualitas data.



LAMPIRAN

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja
2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
3. Jumlah Pegawai Menurut Golongan
4. Jumlah Pejabat Fungsional
5. Daftar Dokumen Pemerintah yang digunakan sebagai Dasar Hitung Tingkat Pemanfaatan (TPDS)
6. Daftar K/L Target Pembinaan
7. Daftar Prestasi/Penghargaan
8. Daftar Inovasi
9. Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian

LAMPIRAN

Lampiran 1

Pernyataan Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DEPUTI BIDANG STATISTIK DISTRIBUSI DAN JASA
BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat
Jabatan : Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Amalia Adininggar W., ST, M.Si, M.Eng, Ph.D
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pusat Statistik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Amalia Adininggar W., ST, M.Si, M.Eng, Ph.D
NIP. 19720305199903 2 003

Palembang, 24 Januari 2025
Pihak Pertama

Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat
NIP. 19710815199312 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG STATISTIK DISTRIBUSI DAN JASA

No (1)	Sasaran Program (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Peningkatan pemanfaatan data dan insight Statistik Distribusi dan Jasa yang Berkualitas	Tingkat Pemanfaatan Data Statistik Distribusi dan Jasa	65 poin
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kementerian/Lembaga Mitra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa	Persentase kenaikan rata-rata nilai IPS K/L Mitra Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral	3,26 persen

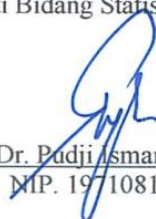
Kegiatan	Anggaran
2902 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi	Rp. 122.850.723.000
2903 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	Rp. 5.737.008.000
2908 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan Teknologi Informasi dan Pariwisata	Rp. 3.952.881.000
JUMLAH	Rp. 132.540.612.000

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik



Amalia Adininggar W., ST, M.Si, M.Eng, Ph.D
NIP. 19720305199903 2 003

Palembang, 24 Januari 2025
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa



Dr. Pudji Smartini, M.App.Stat
NIP. 19710815199312 2 002



Lampiran 2

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025

NO	UNIT ORGANISASI	TINGKAT PENDIDIKAN					JUMLAH
		SLTA	Diploma	D-IV/S-1	S-2	S-3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa	-	-	-	-	1	1
2	Direktorat Statistik Distribusi	10	-	31	33	1	75
3	Direktorat Statistik Harga	4	3	34	27	1	69
4	Direktorat Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata	3	2	13	28	3	49
Jumlah		17	5	78	88	6	194



Lampiran 3

Jumlah Pegawai Menurut Golongan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025

NO	UNIT ORGANISASI	GOLONGAN												JUMLAH
		II/A	II/B	II/C	II/D	III/A	III/B	III/C	III/D	IV/A	IV/B	IV/C	IV/D	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Direktorat Statistik Distribusi	-	-	-	-	4	16	19	20	9	2	4	1	75
3	Direktorat Statistik Harga	-	-	-	-	4	20	13	20	4	5	1	2	69
4	Direktorat Statistik Keuangan, TI dan Pariwisata	-	-	1	-	4	3	12	16	7	4	1	1	49
Jumlah		-	-	1	-	12	39	44	56	20	11	6	5	194

Lampiran 4

Jumlah Pejabat Fungsional Deputy Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Direktur	Statistisi Terampil			Statistisi Ahli			Pranata Komputer			Arsiparis Ahli Pertama	Total	JFU*
				Pelaksana Lanjutan	Penyelia	Pertama	Muda	Madya	Utama	Pertama	Muda				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa	1													
2	Direktorat Statistik Distribusi	75	1	-	5	4	12	38	11	-	-	1	1	72	2
3	Direktorat Statistik Harga	69	1	-	4	1	16	36	7	1	-		1	66	2
4	Direktorat Statistik Keuangan, TI, dan Pariwisata	49	1	-	1	2	6	22	11	-	-		1	43	5
TOTAL		194	3	0	10	7	34	96	29	1	0	1	3	181	9



Lampiran 5

Daftar Dokumen Pemerintah Yang Digunakan Sebagai Dasar Hitung Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS) Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025

No	Daftar Dokumen Pemerintah yang Digunakan sebagai Dasar Hitung Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS)
1	Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan
2	Renstra Kementerian Keuangan
3	Renstra Kementerian Komunikasi dan Digital
4	Renstra Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan
5	Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
6	Renstra Kementerian Koperasi
7	Renstra Kementerian Luar Negeri
8	Renstra Kementerian Perdagangan
9	Renstra Kementerian Perhubungan
10	Renstra Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
11	RKP Aceh
12	RKP Bali
13	RKP Bengkulu
14	RKP Gorontalo
15	RKP Jambi
16	RKP Jawa Tengah
17	RKP Kalimantan Barat
18	RKP Kalimantan Selatan
19	RKP Kalimantan Tengah
20	RKP NTB
21	RKP Sulawesi Barat
22	RKP Sulawesi Tengah
23	RKP Sulawesi Tenggara
24	RKP Sumatera Barat
25	RPJMD Aceh
26	RPJMD Bali
27	RPJMD Bangka Belitung
28	RPJMD Banten
29	RPJMD Bengkulu

No	Daftar Dokumen Pemerintah yang Digunakan sebagai Dasar Hitung Tingkat Pemanfaatan Data Statistik (TPDS)
30	RPJMD Jambi
31	RPJMD Jawa Tengah
32	RPJMD Jawa Timur
33	RPJMD Kalimantan Barat
34	RPJMD Kalimantan Selatan
35	RPJMD Kalimantan Tengah
36	RPJMD Kalimantan Utara
37	RPJMD Lampung
38	RPJMD Maluku
39	RPJMD NTB
40	RPJMD NTT
41	RPJMD Riau
42	RPJMD Sulawesi Barat
43	RPJMD Sulawesi Selatan
44	RPJMD Sulawesi Tengah
45	RPJMD Sulawesi Tenggara
46	RPJMD Sumatera Barat
47	RPJMD Sumatera Selatan
48	RPJMD Sumatera Utara



Lampiran 6

Daftar K/L Target Pembinaan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025

No	DSD	DSH	KTIP
1	Kementerian Perhubungan	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Kementerian Pariwisata
2	Kementerian Koperasi	Kementerian Koordinator Bidang Pangan	Komdigi
3	Kementerian UMKM	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	TVRI
4	Kementerian Keuangan	Kementerian Perdagangan	RRI
5	Kementerian PAN RB	Badan Kepegawaian Negara (BKN)	BPKP
6	Badan Narkotika Nasional	Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	Kementerian Ekonomi Kreatif



Lampiran 7

Daftar Prestasi/Penghargaan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025

No	DSD	DSH	KTIP
1	Penghargaan Atas Pencapaian dalam Pengelolaan Arsip di Lingkup Unit Kerja dengan Nilai Audit Kearsipan Internal Tahun 2025 Sebesar 93,375 dengan Kategori AA (Sangat Memuaskan)	Penghargaan Atas Pencapaian dalam Pengelolaan Arsip di Lingkup Direktorat Statistik Harga dengan Nilai Audit Kearsipan Internal Tahun 2025 Sebesar 93,375 dengan Kategori AA (Sangat Memuaskan)	Insan Statistik Teladan Tahun 2025 terpilih dari Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa
2	Penghargaan DSD sebagai Unit Kerja Eselon II BPS Pusat yang berhasil mendapatkan nilai 3,70 pada Domain Kualitas Data dan nilai 4,00 pada Aspek Pemanfaatan Data Statistik sehingga Kualitas Data dan Pemanfaatan Data Tahun 2025 dinyatakan BERKUALITAS	Hasil penilaian Statistik Berkualitas menunjukkan bahwa Domain Kualitas Data memperoleh nilai 4,00, sedangkan Aspek Pemanfaatan Data Statistik mencapai nilai 3,67. Berdasarkan capaian tersebut, kualitas data dan pemanfaatan data statistik di Direktorat Statistik Harga dinyatakan berada pada kategori "Berkualitas."	Top 1 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2025



Lampiran 8

Daftar Inovasi Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025

No	DSD	DSH	KTIP
1	Pengembangan Dashboard Perdagangan Barang Internasional (PBI)	Aplikasi Tableau yang menampilkan indikator yang dihasilkan untuk rilis Berita Resmi Statistik setiap bulan	Mobile Positioning Data (MPD): Transformasi Pengumpulan Data Wisatawan Nusantara dalam Era Digital
2	Pengembangan Aplikasi D-Stat Indeks Unit Value (IUV)	Penggunaan web konsolidasi dalam kegiatan harmonisasi dan rekonsiliasi data statistik harga setiap bulan, sebagai bahan persiapan untuk Berita Resmi Statistik	Pembangunan Dashboard Perkembangan Perjalanan Wisnus
3	Pengembangan Dashboard Analisis Perdagangan Antar Wilayah (PAW)	Penggunaan CAPI pada Survei Volume Penjualan Eceran Beras (SVPEB) dan Survei Volume Komoditas Khusus (SVK)	



Lampiran 9

Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Tahun 2025

Program/Kegiatan	Pagu Awal 2025	Pagu Rev terakhir	Self Blocking	Pagu yg dapat digunakan	Realisasi	Persentase	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	132.540.612.000	255.740.842.000	210.472.230.000	45.268.612.000	38.222.926.631	84,44	98,40
Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi	122.850.723.000	245.819.783.000	201.589.686.000	44.230.097.000	37.291.381.991	84,31	107,16
Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	5.737.008.000	5.654.412.000	5.327.575.000	326.837.000	288.369.629	88,23	104,37
Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	3.952.881.000	4.266.647.000	3.554.969.000	711.678.000	643.175.011	90,37	108,03
Total	132.540.612.000	255.740.842.000	210.472.230.000	45.268.612.000	38.222.926.631	84,44	98,40



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik



Jl. dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia

Telp (021)3841195, 3842508, 3810291, Faks (021) 3857044

Homepage: www.bps.go.id, Mailbox : bpshq@bps.go.id